Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2016 ISSN : 2086 – 4191

Tazkiya

Jurnal Pendidikan Islam

STRATEGI PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER BERKELANJUTAN PADA ANAK DI SEKOLAH

IJTIHAD SEBAGAI KONSEP PEMBARUAN HUKUM ISLAM

MENAKAR KUALITAS PENDIDIKAN BERKARAKTER DI INDONESIA

PENGARUH KEPRIBADIAN RASULULLAH SAW TERHADAP PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU DALAM PERSFEKTIF ISLAM

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PAI DALAM MENGEMBANGKAN RANAH AFEKTIF SISWA DI MAN 2 MODEL MEDAN

MASJID RAYA MIFTAHUL JANNAH SIBUHUAN KABUPATEN PADANGLAWAS

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU) MEDAN
Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371. http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id

MENAKAR KUALITAS PENDIDIKAN BERKARAKTER DI INDONESIA

Maslathif Dwi Purnomo
Dosen Pendidikan Bahasa Inggris, FITK UIN Sumatera Utara
Email: dmaslathif@gmail.com

Abstract: *Education which character seemed to be a new breath for education quality improvement efforts in this country. The noble effort amid declining public confidence in the education system that is applied in this country. But behind it all, the declaration of interest in character education has many obstacles and challenges. The challenge comes from both within the scope of education itself and external factors that are clearly threatening to the success of character education who wants to go. So it is like to be a bitter pill for the managers of education. Can character education really happen in our country with the reality of a nation that is happening now? The answer is in the minds of each of us*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan rekayasa sosial yang bertujuan untuk mencerdaskan, memberi pengertian, pemahaman, pengetahuan dan pemantapan tentang akhlak dan prilaku seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Output yang diharapkan adalah terciptanya manusia yang berbudi luhur tahu benar dan salah, memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, serta kecerdasan spiritual dalam spektrum memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Idealitas tersebut diharapkan mampu terinternalisasi didalam diri setiap peserta didik sehingga menjadi manusia seutuhnya. Idealitas inilah yang kemudian lebih dikenal dengan nama Pendidikan berkarakter

Sebagai ilustrasi, Si Rahman hanyalah nyantri di Pondok Pesantren salaf. Ia belajar selama 9 tahun di Pesantren, ia belajar Ilmu Agama seperti Fiqih, Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, serta Ilmu alat seperti Nahwu, Shorof, Mantiq, Balaghoh. Dan lain sebagainya. Setelah ia lulus dari Pesantren kemudian ia mengajar ilmu Agama di Musholla milik ayahnya yang berada kampungnya. Selain mengajar, ia juga berdagang kitab-kitab pelajaran anak sekolah dan umum di pasar, inilah yang menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari sampai ia bisa naik haji sebanyak 3 kali. Rahman dikenal oleh masyarakat sangat ramah, santun dan baik budi. Ia tak segan-segan menolong tetanganya yang terkena musibah tanpa mengharapkan pamrih apapun, sehingga ia sangat dicintai masyarakat dikampungnya. Sungguh masyarakat sangat mengharapkan semua anak mereka seperti Rahman yang memiliki karakter amat sangat baik karena telah belajar di Pesantren selama 9 Tahun.

Ilustrasi diatas menggambarkan tujuan yang sebenarnya harus dicapai dalam pendidikan berkarakter. berkarakter tidak lagi hanya dalam konsep, berkarakter tidak lagi hanya pada proses pengajaran dikelas dan disekolah, berkarakter tidak hanya dalam cita-cita guru, dosen, yayasan,

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam
Available online at *http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya*

kepala sekolah serta para pemerhati pendidikan.akan tetapi sudah masuk kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam realitas kehidupan. Nah, persoalannya kemudian adalah, apakah konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah mengarah kepada pembentukan karakter lulusan yang dibutuhkan masyarakat? Inilah yang masih perlu dibuktikan.

Realitas Perhatian terhadap Pendidikan

Dalam mendukung pencapaian pendidikan berkarakter, pemerintah melaui Kementerian Pendidikan Nasional telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Hal ini dilakukan karena sepertinya masa studi di sekolah menjadi salah satu perhatian, karena Wajib belajar 9 tahun dianggap masih kurang sacara durasi untuk menghasilkan alumni peserta didik di sekolah berkarakter sabagimana yang diharapkan. Kenyataan lain adalah direalisasikanya dana pendidikan dari APBN sebesar 20% menjadi pintu untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang selama ini dinilai kurang terperhatikan, disamping perbaikan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang juga tidak ketinggalan ikut ditingkatkan melalui program sertifikasi guru. Realitas tersebut secara konseptual dinilai seharusnya sudah dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik sehingga menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter sempurna.

Akan tetapi sebagai *antithesis*, ternyata masih banyak kekurangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di Negara kita, realitas ganti menteri ganti kebijakan, Sistem yang belum sempurna diantaranya masalah kecurangan UN yang belum dapat dicari solusinya, para pengelola lembaga pendidikan yang terlalu bertujuan pada profit oriented, *overlapping* dalam job mengajar atau *mismatch* yang masih rentan terjadi di sekolah-sekolah, serta masih banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran pendidikan baik oleh pemerintah maupun pelaksana pendidikan di tingkat sekolah menjadikan warna pendidikan di Negara kita masih bersifat abu-abu. Artinya antara idelaitas pendidikan berkarakter yang ingin diciptakan dan diraih berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Perlunya berkarakter

Mengapa Seorang Anak Butuh Pendidikan Karakter? Menurut Abdul Haris (2010) Pada dasarnya, Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter. Lingkungan yang berakter yang dimaksud adalah bersihnya lingkungan dari nilai-nilai sosial yang dapat merusak karakter itu sendiri. Artinya apabila seorang anak hidup dilingkungan para pencuri, maka kemungkinan besar anak tersebut akan menjadi pencuri, karena perbuatan mencuri sudah menjadi kebudayaan di dalam masyarakatnya.

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam

Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus *disetting* sedemikian rupa dengan aktifitas-aktifitas yang dapat mendorong terciptanya karakter baik bagi peserta didiknya. Penciptaan karakter baik tersebut harus didukung dari semua lini, artinya sikap dan prilaku seluruh *stake holder* dan pengelola pendidikan harus searah dan saling memberi masukan. Namun, disayangkan bahwa sering kita masih mendengar dan konflik-konflik kepentingan materiil pribadi justru terjadi di lingkungan lembaga pendidikan dan ini justru menjadi pemicu tidak terbentuknya karakter peserta didik dengan baik, karena peserta didik tidak lebih hanya dijadikan sebagai komoditas okonomi bagi pemenuhan hasrat sebagian pengelola pendidikan secara ekonomi.

Faktor luar luar yang menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan berkarakter di Indonesia adalah fakta bahwa adanya 158 kepala daerah tersangkut korupsi sepanjang 2004-2011, 42 anggota DPR terseret korupsi pada kurun waktu 2008-2011, serta kurang lebih 30 anggota DPR periode 1999-2004 terlibat kasus suap pemilihan Gubernur BI, dan tidak kalah menghebohkan lagi berbagai kasus korupsi terjadi di lembaga-lembaga seperti KPU,KY, KPPU, Ditjen Pajak, BI, dan BKPM. Ya, beberapa kasus diatas membuat hati di dada kita "terhentak" akan kelakuan para pejabat Negara yang kita cintai ini. Bagaimana mungkin lembaga pendidikan disatu sisi sedang mati-matian menggalakkan pendidikan berkarakter sementara disisi lain realitas kenegaraan memperlihatkan harapan masa depan yang jauh dari maksud karakter itu sendiri.

Sejatinya, karakter yang perlu ditumbuhkan dan dibentuk dalam diri anak adalah Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, Kemandirian dan Tanggung Jawab, Kejujuran atau Amanah, Hormat dan Santun, Dermawan, Suka Tolong Menolong & Gotong Royong, Percaya Diri dan Pekerja Cerdas, Kepemimpinan dan Keadilan, Baik dan Rendah Hati, toleransi, Kedamaian dan Kesatuan, serta segala sesuatu yang baik yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu Zainuddin (2011) mengatakan bahwa Pendidikan karakter sekarang ini mutlak diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tapi dirumah dan di lingkungan sosial. Bahkan sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini hingga remaja, tetapi juga usia dewasa. Hal ini Mutlak perlu untuk kelangsungan hidup Bangsa ini. Kehidupan bangsa yang lebih berkarakter dan jauh dari sifat-sifat hedonis, opportunis, egois serta keserakahan dalam ekonomi yang menghalalkan segala cara.

Idealitas Pendidikan

Ada lima pilar yang harus dijadikan *mindset* pendidikan di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang. *pertama*, pendidikan harus berorientasi pada *"Discipline knowledge"*, artinya pendidikan harus menghasilkan orang-orang yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan apa yang diminati dan dikehendaki, namun tidak luput dari dasar-dasar ilmu lain

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam

yang terkorelasi dengan disiplin yang dikehendaki, dalam perspektif ini, seorang pengajar diwajibkan memiliki profesionalisme ke-ilmuan sesuai dengan bidang yang diajarkan. Apabila dia mengajar Bahasa Inggris, maka ia harus memiliki keahlian bahasa inggris baik secara formal mapun skill dan kecakapan, apabila ia mengajar ilmu IPA, maka dia juga harus memiliki keahlian secara formal dan skill tentang ilmu IPA tersebut. *Kedua*, pendidikan harus mampu melakukan langkah *"Synthesizing"* artinya setelah memperoleh pengetahuan yang sinambung dengan apa yang diharapkan, seorang terdidik harus mampu melakukan pemetaan terhadap suatu masalah dengan mengetahui akar pokok masalah dan mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, dalam kaitannya dengan pilar yang kedua ini, lebih lanjut seorang terdidik akan tetap mempertahankan suatu konsep lama yang masih baik dan senantiasa berupaya mencari konsep baru yang jauh lebih baik, (*Almuhafadhotu 'Ala Al-qodimi sholih, wal akhdzu bil jadidi Al-ashlah*).

Ketiga, seorang terdidik harus memiliki insting kreatifitas yang disebut dengan *"Creative Mind"* artinya menemukan hal-hal yang baru menjadi sebuah kelaziman bagi seorang yang memiliki pendidikan, dan itu bermuara dari dorongan seorang pengajar yang senantiasa memberikan gambaran-gambaran akan hal-hal yang baru, sehingga pelajar memiliki insting untuk berkreatifitas dengan pengetahuan yang dimilikinya. *Keempat*, Pendidikan harus dilandasi dengan sikap saling menghargai, istilah ini kemudian disebut *"Respectful Mind" artinya,* apapun dasar keilmuan yang dimiliki, pendidikan harus berorientasi sama yaitu mencerdaskan, memahamkan, dan membuat mengerti tentang tujuan pendidikan itu sendiri. *Kelima*, Pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter seseorang (*character building).* Seorang terdidik harus memiliki akhlak prilaku dan pola pikir terdidik juga, sehingga ia nanti akan bersifat terbuka dan menghargai orang lain. Dalam konteks ini lebih tepat disebut dengan istilah *"Etical Mind".* Hal ini harus dimiliki, karena dasar dari manusia yang terdidik dan memiliki pendidikan haruslah memiliki karakter yang jelas,yaitu karakter berakhlak mulia.

Realitas Empirik Yang Terlupakan

Berdasar pada lima pilar pendidikan yang harus menjadi *Mindset* tersebut diatas, mari kita kaitkan dengan kondisi realitas pendidikan di Negara kita saat ini, khususnya dengan berlangsungnya Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan yang saat ini tengah berjalan di tingkat SMP, SMA, SMK dan sederajat. *Pertama*, jika pendidikan di Indonesia harus mengarah pada penguasaan ilmu secara professional (*Discipline Knowledge*). Mengapa Ujian Nasional harus dilaksanakan dan menjadi satu-satunya acuan kelulusan bagi seorang pelajar? (walaupun dalam konteks ini pemerintah berdalih bahwa Mapel lain juga menjadi dasar

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam

bagi kelulusan, tapi pada kenyataannya tidak). Bukankah materi-materi yang di ujikan dalam UN tersebut masih terlalu jauh dari merepresentasikan keluasan ilmu yang telah dipelajarai oleh pelajar? Apakah tidak disadari bahwa dengan hanya mengujikan beberapa (6 Mapel untuk tingkat SMA/sederajat dan 4 Mapel untuk tingkat SMP/sederajat) mata pelajaran yang telah dipelajari oleh pelajar, akan menumbuhkan sikap meremehkan pelajaran lain yang telah dipelajari? Bisakah dikatakan mengarah pada profesionalisme, apabila seorang pelajar harus *mati-matian* mempelajari suatu mata pelajaran yang sama sekali tidak dia sukai dan tidak mengarah pada profesionalisme yang diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang berkecamuk dipikiran saya, karena sepertinya masih terlalu jauh dari *mindset* yang diharapkan yaitu *"Discipline Knowledge"* sebagai pilar yang ingin diterapkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini.

Kedua, seorang yang terdidik nantinya diharapkan mampu melakukan pemetaan masalah dan mencari solusi yang tepat terhadap masalah tersebut (*synthesizing Mind*). Dalam perspektif ini, kembali saya mengajukan pertanyaan, mampukah seorang pelajar melakukan pemetaan masalah dengan hanya mengutamakan beberapa mata pelajaran yang di UN saat ini? Kenyataan dilapangan membuktikan, bahwa semenjak dijadikannya UN sebagai standar formal kelulusan oleh pemerintah, minat (*interest)* pelajar semakin berkurang untuk lebih mendalami pelaran-pelajaran yang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ujian Nasional, kendatipun telah ditegaskan oleh pemerintah, bahwa institusi pendidikan (baca: Sekolah) sebagai *stake Holder* pelaksana pendidikan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelulusan melalui penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mudah dilaksanakan, hal ini disebabkan karena tenaga untuk mengarah kesana sudah habis *disedot* oleh upaya stake holder untuk mensukseskan mata pelajaran Ujian Nasional yang akan dihadapi, sehingga konsekwensinya, Mata Pelajaran yang diberi ruang untuk lebih diperhatikan dengan cara mengadakan bimbingan belajar, try out, simulasi dan sejenisnya hanyalah mata pelajaran yang akan di UN-kan saja, sementara Mata Pelajaran lain seakan tidak lebih hanya sebagai pelengkap saja tanpa ada upaya-upaya yang serius untuk membenahi kurikulum dan sistemnya. Karenanya, kembali saya bertanya apakah realitas ini akan mampu mengantarkan para pelajar sebagai seorang yang terdidik mampu melakukan pemetaan masalah? Tidakkah hal ironis yang nantinya akan kita dapatkan dari realitas ini?

Ketiga, jika melalui pendidikan seorang pelajar diharapkan mampu memiliki insting kreatifitas untuk menemukan dan membuat hal yang baru yang lebih baik lagi *(Creative Mind)* dengan pengajar sebagai motor penggerak timbulnya sebuah kreatifitas tersebut, maka pertanyaan saya adalah: Apakah spesialisai yang dilakukan saat ini terhadap Mata Pelajaran – Mata Pelajaran tertentu yang di UN-kan saja mampu mendorong daya imajinasi, kreasi dan aktifitas pelajar untuk

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam

menemukan hal yang baru? Tidakkah dikhawatirkan nantinya justru dengan spesialisai saat ini, malah akan mendorong pelajar melakukan segala cara untuk bisa berhasil dari terkaman mulut buaya (baca: UN) yang mau tidak mau harus dihadapi?. Penentuan standar kelulusan untuk Ujian Nasional yang telah ditetapkan, dalam kenyataannya justru malah menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja, khususnya untuk institusi pendidikan dan pelajar. Sehingga dalam setiap pergantian tahun pelajaran yang menjadi fikiran adalah bagaimana caranya untuk dapat menjinakkan bom waktu yang siap meledak tersebut. Konsekwensinya, parktis yang dibicarakan hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan Ujian Nasional dan mengesampingkan hal lain yang justru lebih penting seperti pembinaan akhlak, kepribadian, prilaku dan pola pikir. Mungkinkah seorang pelajar yang sejatinya ingin mengembangakan ilmu keolahragaannya mampu merealisasikan hal tersebut sedangkan waktunya habis tersita untuk memikirkan Ujian Nasional? Dan masih banyak hal lain yang merupakan bukti termarjinalkannya pelajaran-pelajaran lain hanya karena Ujian nasional.

Keempat, sungguh sangat membahagiakan apabila arah pendidikan kedepan di Indonesia diarahkan kepada pilar saling menghargai antara pengajar dengan pelajar (*Respectful Mind*). Namun mungkinkah itu terwujud apabila pemerintah akan tetap melaksanakan Ujian nasional yang dalam kenyataannya justru membuat pelajar tidak lagi menghargai pengajar dan pengajar hanya berorientasi pada kognitifitas pelajar saja? Hal ini sungguh dapat dibuktikan melalui implikasi negatif adanya Ujian Nasional, temuan dilapangan membuktikan bahwa pelajar saat ini sudah mengelompokkan guru mana yang harus dihormati dan guru mana yang tidak wajib dihormati, tentunya jelas bahwa guru yang harus dihormati adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang di Un-kan saja, dengan harapan pada saat Ujian nasional nantinya mereka akan mendapatkan bantuan jawaban dari guru tersebut. Sementara guru yang mengajar mata pelajaran lain sudah beralih fungsi menjadi iklan reklame yang setiap hari di dengar dan dilihat namun sangat minim untuk di ikuti dan di ambil kata-kata serta nasehatnya. Ah, sungguh ironis.

Kelima, sebagai pondasi kehidupan bagi seorang yang terdidik, maka pelajar harus memiliki sikap yang didasarkan pada luhurnya akhak dan etika *(Ethical Mind)*, namun dalam praktik nyatanya, implikasi penentuan mata pelajaran khusus yang di ujikan dalam UN, justru malah memunculkan gejala-gejala sosial baru yang berhubungan dengan etika seorang pelajar, yang sungguh sama sekali jauh dari apa yang diharapkan. Apabila yang diharapkan bahwa melalui pendidikan seorang pelajar akan lebih semangat belajar, maka kenyataan membuktikan bahwa justru saat ini minat belajar pelajar semakin menurun karena mereka beranggapan tidak ada gunya belajar *toh* nanti akan dibantu juga. Dari sudut pandang penghormatan terhadap pengajar, sungguh ini telah mengalami degradasi, karena pelajar menjadi tidak hormat, meremehkan, dan bertindak

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam

sesuka hati. Sehingga prilaku pelajar kita saat ini jauh dari apa yang diktakan "berakhlakul karimah". Ironis bukan?

Sistem yang dipaksakan

Kebanyaan orang sering bilang, "anda tidak bependidikan ya, kok ngomongnya kayak gitu". "dia itu orang berpendidikan, makanya sopan dan bersahaja". "para elit politik hendaknya belajar tentang pendidikan etika, supaya bisa santun dalam menyampaikan pendapat dan tidak menyinggung orang lain". "dia tidak pernah mengenyam bangku sekolah, makanya dia kampungan cara berpikirnya".

Ungkapan diatas seakan menjadi petunjuk bagi kita bahwa sesungguhnya pendidikan itu bertujuan tidak hanya untuk mencerdaskan otak secara kognitif saja, tetapi juga pencapaian akhlak dan prilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya menurut Muzakki (2010) bahwa masyarakat menilai keberhasilan seseorang dalam pendidikan justru ketika seorang terdidik tersebut dapat bersosialisasi di masyarakat dengan mudah dan memiliki kesopanan serta prilaku yang terpuji menurut ukuran masyarakat. Dalam kata lain, karakter hasil dari suatu pendidikan harus bersentuhan dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Namun persoalannya sekarang adalah, apakah Pendidikan berkarakter yang sedang digalakkan di Indonesia saat ini sudah memperhatikan hal-hal tersebut diatas? Atau justru malah lebih mengedepankan pada tata ukuran keberhasilan secara kognitif semata?

Tidak mudah menjawab pertanyaan diatas, karena pada kenyataannya sistem pendidikan di Indonesia saat ini terkesan dipaksakan dengan diadakannya Ujian Nasional sebagai standar kelulusan pendidikan. UN dengan berbagai persoalanya sebenarnya sudah mengabaikan keinginan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan format yang lebih bagus bagi standar evaluasi pendidikan. Pada keanyataannya Ujian ini hanya terkesan sebuah formalitas tahunan belaka, karena nilai yang diperoleh tidak bisa menjadi acuan untuk masuk kejenjang yang lebih tinggi lagi. Kebanyakan perguruan tinggi malah terang-terangan menolak nilai UN karena terlalu banyak terindikasi kecurangan dalam pelaksanaannya. Oleh keran itu standar masuk perguruan tinggi masih menggandalkan jalur testing, baik tes secara bersama-sama (SNMPTN) atau tes secara mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Hal senada juga berlaku di pendidikan tingkat menengah. Siswa yang lulus SMP dengan nilai UN tinggi tidak lantas dengan mudah bisa masuk ke SMA/MA/SMK favorit. Mereka harus melalui tes standar yang diadakan oleh masing-masing institusi tersebut untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Disini nilai UN tidak begitu dibutuhkan, justru siswa yang memiliki nilai UN tinggi akan dipertanyakan kredibilitasnya. Nah sepertinya dalam hal ini hasil UN berbanding

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam

terbalik dengan asumsi pihak sekolah pada umumnya. Suatu pertanyaan besar, kenapa hal itu terjadi, kenapa pihak sekolah menengah atas maupun kejuruan tidak percaya dengan hasil UN yang dicapai oleh para siswa SMP?

Ahma Muthohar (2012) berpendapat bahwa Masyarakat Indonesia sekarang tidaklah terlalu bodoh untuk dapat menilai sistem pendidikan yang diselenggarakan di negara ini. Oleh karena itu sistem pendidikan (termasuk didalamnya pelaksanaan UN) yang terkesan dipaksakan hendaknyalah segera diakhiri. kalau tidak maka masyarakat akan semakin apatis dan tidak percaya terhadap output dari pendidikan di negara ini. Lalu mau dibawa kemana para generasi muda penerus bangsa ini nanti jika hasil dari mereka belajar selama 12 tahun tidak dipercaya oleh masyarakat?

Pendidikan Belah Jengkol

Ditengah-tengah penyelengaraan UN sering kita lihat baik di media cetak maupun elektronik para pejabat negara dan politisi meninjau pelaksanaan UN di beberapa sekolah. Ini tentunya membuat tanda tanya besar bagi kita, mengapa para pejabat dan politisi tersebut begitu getol meninjau pelaksanaan UN. Sebagai bentuk perhatiankah ataukah hanya memanfaatkan momentum UN ini sebagai instrumen agitasi? Kalaulah itu sebagai bentuk perhatian, mengapa harus pada saat pelaksanan UN saja mereka getol meninjau ke lokasi? Akan lebih baik jika mereka meninjau sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang kebanyakan masih mengalami kesenjangan antara sekolah yang berada dikota dan sekolah yang berada pelosok daerah.

Sepertinya even UN ini dari tahun ke tahun sudah dimanfaatkan sebagai ajang dari berbagai kepentingan, tidak hanya kepentingan material berupa proyek penyelenggaraannya, namun juga ajang sosialisasi popularitas elit dan politisi tertentu. Dalam hal ini pendidikan tidak lagi dijadikan sebagai instrumen pembentuk kepribadian yang baik, mencerdaskan anak bangsa dan pencapaian karakter yang diharapkan. Sepertinya sudah terjadi distorsi tujuan pendidikan yang sebenarnya. Namun anehnya hal ini terkesan tidak disadari oleh pihak-pihak terkait. Pola saling memanfaatkan momentum inipun seakan sudah menjadi trend yang mengarah kepada pengambilan berbagai kepentingan , tak pelak penyelenggaraan UN inipun sudah menjadi ajang memperkenalkan diri kepada publik guna meraih simpati melalui sikap perhatian (yang sesungguhya mungkin hanya kamuflase semata) terhadap penyelenggaraan UN.

Campur aduknya berbagai kepentingan inilah yang sebenarnya menjadi pemicu rancunya penyelengaraan UN selama ini. Berbagai kalangan sepertinya tidak mau kehilangan kuenya masing-masing, sehingga dengan berbagai upaya mereka berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingg penyelenggaraan UN bukan hanya bermasalah pada sistem evaluasinya, namun

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam

juga bermasalah pada tujuan para pejabat diatas yang hanya tahu akan proyek pencetakan soal dan lembar jawaban saja, juga disertai oleh kepentingan beberapa pejabat dan politisi yang menjadikan even UN sebagai media propaganda dan agitasi, serta tidak kalah ironisnya kebocoran soal dan beredarnya jawaban yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi menjadi fakta bahwa betapa UN ini sudah sangat sarat dengan berbagai kepentingan. Ya, ibarat jengkol yang dibelah-belah.. walau pahit rasanya namun semua juga ingin merasakannya.

Sepertinya pemerintah sudah harus mengevaluasi penyelengaraan UN sebagai instrument evaluasi pendidikan di Negara ini. Masalah kurangnya pemerataan, sarana dan prasarana, kualitas tenaga pengajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, marjinalisasi mata pelajaran yang lain, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil UN serta tidak tepatnya siswa yang lulus dengan predikat terbaik sampai pada indikasi penyelewengan UN sepertinya sudah cukup menjadi instrumen untuk menegasikan pelaksanaan UN dimasa yang akan datang. Pemerintah melalui kemdikbud harus mencari formula baru sebagai sistem evaluasi pendidikan di negeri ini. Jika tidak, praktik sama akan terulang pada penyelenggaraan UN dimasa yang akan datang. Banyak yang menyayangkan uang negara yang bernilai milyaran itu hilang hanya gara-gara demi prestise semu semata.

Penutup

Bagi bangsa Indonesia sekarang ini, pendidikan karakter berarti melakukan usaha sungguh-sungguh, sitematik dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran serta keyakinan semua orang Indonesia bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih baik tanpa membangun dan menguatkan karakter rakyat Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada masa depan yang lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa kegigihan, tanpa semangat belajar yang tinggi, tanpa mengembangkan rasa tanggung jawab, tanpa memupuk persatuan di tengah-tengah kebinekaan, tanpa semangat berkontribusi bagi kemajuan bersama, serta tanpa rasa percaya diri dan optimisme. Inilah tantangan kita sekaligus sebagai solusi alternatif bangsa Indonesia, mudah-mudahan kita sanggup melakukanya.

DAFTAR PUSTAKA

Haris. Abdul, 2010. *Mewujudkan Pendidikan Berkarakter,* Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Muzakki. Ahmad, 2012. *Manajemen Sekolah Berkarakter*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Muzakki. Ahmad, 2013. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Muthohar. Ahmad, 2012. *Total quality Management In Education,* jogjakarta: PT RciSoD

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam
Available online at *http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya*

Zainuddin, 2011. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya.

Nawawi Hadari, 2001. " *Kepemimpinan Menurut Islam"* . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Oemar Hamalik, 1993. *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Syarifudin 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi,* Jakarta: PT Grasindo.

Syarifudin, 2005. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: PT CIPUTAT PRESS

Copyright ® 2016, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam
Available online at *http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya*